

Penilaian BPK Kubu Raya Ranking Pertama

PONTIANAK—Tindakan pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI meningkat 10 persen pada semester satu tahun 2011. Hasil penilaian menunjukkan Kabupaten Kubu Raya menduduki peringkat pertama dan Melawi peringkat terakhir.

"Berdasarkan tingkat kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi menggunakan skala nilai nol sampai 60, Kabupaten Kubu Raya memiliki skor 59 dan Melawi 14," ujar Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat, Adi Sudibyo, ketika Penyerahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Kalbar Semester I Tahun 2011.



Adi Sudibyo

Peringkat kedua diraih Kabupaten Sambas dan Kapuas Hulu dengan skor 57. Kabupaten Landak pada peringkat ketiga dengan skor 44, diikuti Bengkayang dengan skor 43, Sekadau dengan skor 42, Kayong Utara dengan skor 37, Sintang dan Singkawang dengan skor 34, Kabupaten Pontianak dengan skor 33, Kota Pontianak dengan skor 29, Sanggau dengan skor 27, serta Pemprov Kalbar dan Ketapang dengan skor 22.

• ke halaman 15 kolom 2

Penilaian BPK Kubu Raya Ranking Pertama

Sambungan dari halaman 9

Menurut Adi, rendahnya hasil penilaian Melawi ini mungkin dikarenakan kabupaten tersebut masih baru. Beberapa waktu lalu, DPRD Melawi datang dan BPK sudah mendorong tindak lanjutnya. "Mereka menyampaikan permasalahannya. Peran dewan ini cukup signifikan," ungkap Adi.

Hingga semester 1 pada 2011, BPK melakukan pemantuan tindak lanjut terhadap 15 entitas di Kalbar. Tercatat terdapat 2.404 temuan dan 4.849 rekomendasi. Temuan dan rekomendasi ini mengalami peningkatan 12 persen, dibanding tahun sebelumnya yakni 2.144 temuan dan 4.313 rekomendasi.

Dari 4.849 rekomendasi yang diberikan BPK, sebanyak 57 persen atau 2.740 rekomendasi sesuai dengan tindak lanjut. Sebanyak 28 persen atau 1.339 rekomendasi belum sesuai dengan tindak lanjut, dan 770 rekomendasi atau 16 persen belum ditindaklanjuti.

Adi menyatakan dari hasil yang diperoleh menunjukkan pemerintah daerah di Kalbar telah berusaha keras menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, dan menghasilkan capaian cukup signifikan. "Kami memberi apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian tersebut," kata Adi.

Berkaitan dengan hasil penilaian pemprov, Adi menyatakan masih banyak masalah dikarenakan anggarannya cukup besar dan wilayah kerjanya juga besar. Selain itu, sisa-sisa masalah yang lama cukup banyak.

"Pemprov baru bergerak setelah Sekda yang baru. Tahun lalu praktis belum bergerak. Hasilnya baru terlihat semester depan," katanya. Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan ada beberapa temuan BPK yang masih menunggu inkrah, diantaranya persoalan aset.

"Sekarang ini masih menunggu Badan Pertanahan Nasional," katanya. Ia mencontohkan aset berupa tanah SD Inpres. Dulu ketika program tersebut dilaksanakan, tidak dipikirkan soal sertifikatnya. "Sekarang sedang diproses melalui kementerian dan Dinas Pendidikan," timpalnya. (*uni*)